

***Flypaper Effect* pada Dana Transfer Khusus, Retribusi Daerah, Belanja Modal dan Pajak Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Provinsi di Pulau Sumatera**

Sandrina Anggraini¹, Sulaiman², Yevi Dwitayanti³

Program Studi Akuntansi Sektor Publik, Politeknik Negeri Sriwijaya, Indonesia^{1,2,3}

*Email Korespondensi: sandrinanggraini12@gmail.com

Diterima: 03-04-2026 | Disetujui: 12-04-2026 Diterbitkan: 14-04-2026

ABSTRACT

This research aims to empirically determine the influence of Special Transfer Funds, Regional Levies, Capital Expenditures, and Regional Taxes on the Financial Independence of Provinces on the Island of Sumatra. This study uses a descriptive method with a quantitative approach. The data used in this study is secondary data. The data collection technique in this thesis is quantitative data. The data in this study were analyzed using multiple regression analysis using research tools in the form of Eviews Software (Econometric Views 12). The results of this study indicate that Special Transfer Funds, Regional Retributions and Capital Expenditures partially have no effect and are not significant on Regional Financial Independence. The results of testing all variables simultaneously Special Transfer Funds, Regional Retributions, Capital Expenditures and Regional Taxes have a significant effect on Regional Financial Independence and there is a Flypaper Effect phenomenon.

Keywords: *Special Transfer Funds, Regional Retribution, Capital Expenditure, Regional Tax, Regional Financial Independen.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara empiris pengaruh Dana Transfer Khusus, Retribusi Daerah, Belanja Modal dan Pajak Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi di Pulau Sumatera. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Sekunder. Teknik pengumpulan data dalam skripsi ini berupa data kuantitatif. Data dalam penelitian ini dianalisis menggunakan analisis regresi berganda dengan menggunakan alat penelitian berupa *Software Eviews (Econometric Views 12)*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dana Transfer Khusus, Retribusi Daerah dan Belanja Modal secara persial tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Hasil pengujian seluruh variabel secara simultan Dana Transfer Khusus, Retribusi Daerah, Belanja Modal dan Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah dan terdapat fenomena *Flypaper Effect*.

Kata kunci: Dana Transfer Khusus, Retribusi Daerah, Belanja Modal, Pajak Daerah, Kemandirian Keuangan Daerah

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Anggraini, S., Sulaiman, S., & Dwitayanti, Y. (2026). Flypaper Effect pada Dana Transfer Khusus, Retribusi Daerah, Belanja Modal dan Pajak Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Provinsi di Pulau Sumatera. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2(2), 1196-1210. <https://doi.org/10.63822/1sa1mc16>

PENDAHULUAN

Otonomi daerah adalah upaya memberdayakan daerah untuk mengambil keputusan daerah secara komperhensif terkait pengelolaan sumber dayanya sesuai dengan kepentingan, prioritas dan potensi masing-masing. Berdasarkan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan masyarakatnya dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemandirian Keuangan Pemerintah daerah adalah tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah (Ades Hidayah dkk., 2025) pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah (Bakar & Said, 2021)

Kemampuan Keuangan	Rasio Kemandirian	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0 - 25%	Instruktif
Rendah	> 25 - 50%	Konsultatif
Sedang	> 50 - 75%	Partisipatif
Tinggi	> 75 - 100%	Delegatif

Sumber: (Halim 2007)

Gambar 1 Kriteria Kemandirian Keuangan Daerah.

Kriteria Tingkat Kemandirian keuangan pemerintah daerah bervariasi tergantung pada kekuatan keuangannya. Nilai antara 0 dan 25% menunjukkan kemandirian keuangan daerah yang sangat rendah. Nilai antara 25 dan 50% menunjukkan kemandirian keuangan daerah yang rendah dan oleh karena itu dianggap sebagai indikator yang memuaskan untuk kemandirian keuangan pemerintah daerah. Nilai antara 50 dan 75% menunjukkan kemandirian keuangan sedang dan merupakan indikator yang baik untuk kemandirian keuangan daerah. Nilai antara 75 dan 100% menunjukkan kemandirian keuangan yang tinggi dan juga merupakan indikator yang baik untuk kemandirian keuangan pemerintah daerah.

Kemandirian keuangan daerah sangatlah penting untuk membangun tata kelola pemerintah daerah yang tangguh dan akuntabel, yang mampu memberikan layanan publik berkualitas tinggi secara berkelanjutan. Daerah yang otonom secara keuangan akan memiliki fleksibilitas untuk mengembangkan kebijakan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan wilayahnya masing-masing tanpa sepenuhnya bergantung pada keputusan keuangan pemerintah pusat. Otonomi keuangan juga krusial bagi pelaksanaan otonomi daerah yang efektif. Dengan meningkatkan pendapatannya, pemerintah daerah harus memikul tanggung jawab yang lebih besar dalam pengelolaan anggaran, meningkatkan efisiensi belanja, dan mendorong partisipasi warga dalam pembangunan.



Sumber: BPK RI, Data Diolah (2025)

Gambar 2 Presentase Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2019-2023

Dapat dilihat dari gambar 2 bahwa tingkat kemandirian daerah pada provinsi di pulau sumatera berbeda-beda disetiap provinsi, seperti Aceh, Bengkulu, dan Kepulauan Bangka Belitung yang dimana presentase tingkat kemandiriannya kurang dari 60% yang artinya ketiga provinsi diatas masih bergantung pada dana transfer pemerintah pusat, berbanding terbalik dengan provinsi Sumatera Utara, Riau dan Lampung yang dimana presentase tingkat kemandiriannya lebih dari 100% yang artinya ketiga provinsi diatas tidak mengandalkan dana transfer untuk kegiatan pemerintahannya. Hal ini membuat provinsi Aceh, Bengkulu dan Kepulauan Bangka Belitung mengalami fenomena Flypaper Effect.

Penelitian ini sebelumnya dilakukan oleh (Saraswati & Nurharjanti, 2021) dengan hasil penelitian menunjukkan secara simultan Dana Perimbangan, Retribusi Daerah, Belanja Modal dan Pajak Daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Penelitian lain yang dilakukan oleh (Lukitawati & Pringgabayu, 2024) dengan hasil penelitian Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara persial dan simultan memiliki pengaruh yang simultan terhadap kemandirian keuangan daerah. Penelitian yang dilakukan oleh (Dewi et al., 2024) dengan menggunakan variabel Pajak Daerah dan Belanja Modal terhadap Kemandirian Keuangan Daerah dengan hasil menunjukkan bahwa dalam penelitian ini ditemukan fenomena Flypaper Effect pada daerah provinsi dipulau Bali dan kondisi ini memberikan pengaruh negative terhadap kemandirian keuangan daerah khususnya kemandirian fiscal dearah.

Penelitian ini difokuskan pada beberapa komponen yang telah dibahas oleh peneliti sebelumnya karena fenomena masalah dan hasil yang tidak konsisten terkait Retribusi daerah, Belanja Modal dan Pajak Daerah peneliti ini juga mengambil beberapa elemen yang belum banyak dibahas dan diuji dalam peneliti sebelumnya, seperti Dana Transfer Khusus yang diukur dengan dituntut untuk menjalankan kegiatan secara efisien guna mencapai tujuan bersama, dengan harapan dapat mengoptimalkan pelaksanaan program. pentingnya pengelolaan keuangan yang efisien agar daerah dapat menjaga keseimbangan antara stabilitas likuiditas dan investasi jangka panjang melalui belanja modal. kehilangan pendapatan akibat informasi yang asimetris dalam pengambilan keputusan, (Raharjo, 2018). Konteks hubungan prinsipal–agen pada penelitian ini memposisikan pemerintah pusat dan masyarakat sebagai prinsipal, sementara pemerintah daerah berperan sebagai agen yang melaksanakan administrasi pemerintahan sesuai regulasi.

Penelitian sebelumnya menghasilkan berbagai temuan, (Mulyani & Fitra, 2023) memberikan hasil bahwa rasio derajat desentralisasi mempengaruhi signifikan terhadap perubahan alokasi belanja modal, sedangkan (Muttaqin, (2024), menyatakan tidak berpengaruh. (Andani 2022) menyimpulkan rasio efisiensi

Flypaper Effect pada Dana Transfer Khusus, Retribusi Daerah, Belanja Modal dan Pajak Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Provinsi di Pulau Sumatera
 (Anggraini, et al.)

keuangan berpengaruh signifikan, namun (Rohyana & Ramadhanti, (2024), menemukan sebaliknya. Sementara itu, (Zulkarnain, (2020) menyoroti perbandingan antara likuiditas daerah dan belanja modal untuk aset tetap, yang diharapkan memberi manfaat langsung bagi masyarakat. Penelitian ini difokuskan pada beberapa komponen yang telah dibahas oleh penelitian sebelumnya karena fenomena masalah dan hasil yang tidak konsisten terkait belanja modal. Peneliti juga mengambil beberapa elemen yang Belum banyak dibahas dan diuji dalam penelitian sebelumnya, seperti dana transfer khusus yang dimana banyak pemerintah daerah yang belum memanfaatkan dana transfer yang diberikan pada pemerintah pusat ke pemerintah daerah digunakan dengan tepat. Merujuk pada latar belakang, fokus utama pada penelitian ini diarahkan untuk mengkaji dan menganalisis kemandirian keuangan daerah provinsi di pulau sumatera dalam pengaruh dana transfer khusus, retribusi daerah, belanja modal dan pajak daerah dan mengetahui apakah terdapat fenomena Flypaper Effect pada provinsi di pulau sumatera tersebut.

TINJAUAN PUSTAKA

Dana Transfer Khusus

Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah yang sesuai dengan prioritas nasional, DAK fisik meliputi DAK Reguler, DAK IPD, dan DAK Afirmasi. Sedangkan DAK Nonfisik meliputi Dana Bos, Dana BOP PAUD, Dana TPG PNSD, Dana Tamsil Guru PNSD, Dana P2D2, Dana BOK dan BOKB dan Dana PK2 UKM dan Naker.

Retribusi Daerah

Bedasarkan UU No. 1 tahun 2022 Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pemabayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Sedangkan menurut (Sudirno & Mulyani², 2021) penerimaan retribusi daerah akan berpengaruh terhadap besaran pendapatan asli daerah (PAD), apabila dana retribusi yang masuk ke kas daerah mampu memberikan kontribusi terhadap daerah untuk pembangunan daerah sehingga daerah tersebut mampu memenuhi kebutuhan dari pendapatan asli daerah (PAD) dan mendominasi pembiayaan daerah dibandingkan dana pemerintah pusat, sehingga daerah mampu membiayai pembangunan daerahnya sendiri, artinya tinggi rendahnya retribusi dapat mempengaruhi kemandirian keuangan daerah.

Belanja Modal

Pemerintah daerah menggunakan belanja modal, sebagaimana dimaksud dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) sebagaimana ditentukan dalam PP Nomor 71 Tahun 2010, untuk membeli, membangun, atau meningkatkan aset tetap dan aset lainnya yang dibutuhkan untuk beberapa periode akuntansi. Suatu pengeluaran dianggap sebagai belanja modal sesuai dengan peraturan Nomor Per-33/PB/2008 dari Direktorat Jendral Perbendaharaan.

Pajak Daerah

Bedasarkan UU No. 1 Tahun 2022, Pajak daerah adalah konritbusi wajib kepada daerah yang

Flypaper Effect pada Dana Transfer Khusus, Retribusi Daerah, Belanja Modal dan Pajak Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Provinsi di Pulau Sumatera

(Anggraini, et al.)

terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari penelitian (Saraswati & Nurharjanti, 2021) menjelaskan bahwa Tarif hidup masyarakat setempat dapat tergambarkan dari daya bayar masyarakat terhadap pajak daerah, apabila masyarakat memiliki tarif hidup yang tinggi dan sumber daya yang mempunyai maka akan berusaha mendukung program-program pemerintah dalam mewujudkan kemandirian keuangan daerah dan dapat dilihat dari peran pemerintah dan dukungan dari masyarakat yang akan membawa keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian Keuangan Daerah adalah tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah daerah baik dalam pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat yang telah membayar pajak dan restribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah penelitian yang dilakukan oleh (Saraswati & Nurharjanti, 2021) menjelaskan bahwa kemandirian keuangan daerah adalah salah satu parameter utama dalam mengukur kinerja pemerintah, dimana pemerintah daerah berupaya melakukan pembiayaan kegiatan daerah tanpa tergantung dari pihak luar termasuk pemerintah pusat. Penelitian lain yang dilakukan oleh (Malau & Simarmata, 2020) kemandirian keuangan daerah adalah kemampuan daerah untuk menggali potensi sumber daya sehingga dapat mengurangi atau tidak tergantung pada pihak eksternal daerah, keuangan daerah yang mandiri menunjukkan kemampuan pemerintah dalam membiayai oprasional pemerintahan dan pembagunan daerah dengan menggunakan sumber pendapatan asli daerah, kemandirian keuangan daerah dapat ditunjukkan dari perbandingan besarnya nilai PAD terhadap penerimaan transfer dari pusat maupun pinjaman daerah.

Hipotesis Penelitian

Merujuk pada uraian tersebut serta mempertimbangkan adanya ketidak- konsistenan temuan pada penelitian terdahulu, peneliti menyusun hipotesis sebagai berikut:

- H1: Dana Transfer Khusus diasumsikan memiliki pengaruh terhadap Kemandirian Keuangan daerah provinsi di Pulau Sumatera.
- H2: Retribusi Daerah diasumsikan memiliki pengaruh terhadap Kemandirian Keuangan daerah provinsi di Pulau Sumatera.
- H3: Belanja Modal diasumsikan memiliki pengaruh terhadap Kemandirian Keuangan daerah provinsi di Pulau Sumatera
- H4: Pajak Daerah diasumsikan memiliki pengaruh terhadap Kemandirian Keuangan daerah provinsi di Pulau Sumatera.
- H5: Dana Transfer Khusus, Retribusi Daerah, Belanja Modal dan Pajak Daerah diasumsikan berpengaruh secara bersama-sama terhadap Kemandirian Keuangan daerah provinsi di Pulau Sumatera

METODE PENELITIAN

Kajian ini mengadopsi pendekatan kuantitatif dengan mengolah data sekunder yang bersumber dari situs resmi BPK RI berupa laporan keuangan pemerintah daerah provinsi di Pulau Sumatera periode 2019-

2023. Teknik pemilihan Sampel ditetapkan melalui teknik purposive sampling, menghasilkan total 45 unit observasi yang memenuhi kriteria, meliputi 9 provinsi selama periode 5 tahun, Kriteria/pertimbangan Dasar acuan dalam penentuan sampel pada penelitian ini berupa Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi di Pulau Sumatera. Untuk menjelaskan distribusi unit analisis, maka penelitian ini menggunakan statistik deskriptif.

Riset ini menerapkan metode analisis regresi berbasis data panel serta regresi linier berganda. Kemudian akan dilakukan pemilihan model panel terbaik untuk melakukan pengujian keterkaitan antara variabel terikat dan variabel bebas. Disamping itu dilakukan pengujian asumsi klasik dan hipotesis. Data yang telah terkumpul diolah menggunakan EViews versi 12. Skala rasio untuk menghitung masing-masing variabel yang diteliti, menggunakan rumus yang disajikan pada bagian berikut.

Variabel	Indikator
Kemandirian Keuangan Daerah	PAD = $\frac{\text{PAD}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$
Dana Transfer Khusus	DAK Fisik DAK Nonfisik
Retribusi Daerah	Retribusi Daerah
Belanja Modal	Belanja Modal
Pajak Daerah	Pajak Daerah

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 4.1
Hasil Statistik Deskriptif

	Y	X1	X2	X3	X4
Mean	0.390270	12.08543	10.05654	11.94993	12.28925
Median	0.387800	12.04636	10.09261	11.98506	12.26922
Maximum	0.588600	14.08405	10.58442	12.49997	12.82399
Minimum	0.171300	11.13033	9.478134	10.87652	11.74957
Std. Dev.	0.099338	0.455414	0.251812	0.297754	0.288014
Skewness	-0.173658	1.456242	-0.135919	-0.770425	0.006568
Kurtosis	2.947645	9.081935	2.591602	4.737073	2.115216
Jarque-Bera	0.257021	94.73435	0.501426	11.23259	1.631281
Probability	0.879404	0.000000	0.778246	0.003638	0.442356
Sum	19.51350	604.2713	502.8270	597.4964	614.4626
Sum Sq. Dev.	0.483538	10.16271	3.107051	4.344217	4.064656
Observations	50	50	50	50	50

Sumber: Data diolah dengan Eviews 12

1. Nilai minimum dari kemandirian keuangan daerah provinsi di pulau sumatera sebagai variabel dependen (Y) adalah 0.171300, artinya kemandirian keuangan daerah terendah adalah 0.171300. dengan nilai maksimum kemandirian keuangan daerah provinsi di pulau sumatera sebesar 0.588600, artinya kemandirian keuangan daerah provinsi dipulau sumatera tertinggi adalah 0.588600 dan nilai mean kemandirian keuangan daerah provinsi di pulau sumatera adalah 0.390270 pada tahun 2019-2023 sedangkan nilai simpangan sebesar 0.099338.

Flypaper Effect pada Dana Transfer Khusus, Retribusi Daerah, Belanja Modal dan Pajak Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Provinsi di Pulau Sumatera

(Anggraini, et al.)

2. Variabel dana transfer khusus sebagai variabel X1 nilai minimum dari dana transfer khusus adalah sebesar 12.08405. nilai maksimum sebesar 14.08405 dengan nilai rata-rata (mean) sebesar 12.08543 pada tahun 2019-2023 sedangkan nilai simpangan sebesar 0.455414
3. Variabel retribusi daerah sebagai variabel X2 dengan nilai minimum adalah 9.478134. nilai maksimum dari variabel retribusi daerah adalah 10.58442 dan nilai rata-rata (mean) sebesar 10.05654 pada tahun 2019-2023, sedangkan nilai simpangan sebesar 0.251812.
4. Variabel belanja modal sebagai X3 nilai minimum dari belanja modal adalah 10.87652. nilai maksimum adalah 12.49997 dan nilai rata-rata (mean) sebesar 11.94993 pada tahun 2019-2023 sedangkan nilai simpangan sebesar 0.297754.
5. Variabel pajak daerah sebagai variabel X4 dengan nilai minimum sebesar 11.74957. nilai maksimum dari variabel ini adalah 12.82399 dan nilai rata-rata (mean) sebesar 12.28925 pada tahun 2019-2023 , sedangkan nilai simpangan adalah 0.288014.

Uji Model Regresi Data Panel

Guna mendapatkan model regresi yang paling sesuai dalam merepresentasikan hubungan antar variabel, penelitian ini menerapkan tiga prosedur pengujian spesifikasi model (Chow, Hausman, dan Lagrange Multiplier), (Basuki, 2021).

Tabel 3
Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	33.860332	(9,36)	0.0000
Cross-section Chi-square	112.380478	9	0.0000

Sumber: Output Eviews 12, 2025

Hasil uji Chow memperlihatkan nilai probabilitas cross-section F sebesar 0,0000, yang lebih kecil dari signifikansi 0,05. Keadaan tersebut mengindikasikan bahwa Ho ditolak, sehingga model yang dinilai paling representatif dalam mengestimasi persamaan regresi ialah Fixed Effect Model (FEM).

Tabel 4
Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	126.852144	4	0.0000

Sumber: Output Eviews 12, 2025

Selanjutnya, model hausman tes menghasilkan angka probabilitas cross- section random senilai

0,0000, lbwih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Temuan ini menegaskan bahwa H_0 ditolak, dan model yang direkomendasikan ialah Fixed Effect Model (FEM)

Tabel 5
Hasil Uji Langrange Multiplier

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	4.148303 (0.0417)	18.78961 (0.0000)	22.93791 (0.0000)
Honda	2.036738 (0.0208)	4.334698 (0.0000)	4.505286 (0.0000)
King-Wu	2.036738 (0.0208)	4.334698 (0.0000)	4.736466 (0.0000)
Standardized Honda	3.012124 (0.0013)	5.367492 (0.0000)	2.689193 (0.0036)
Standardized King-Wu	3.012124 (0.0013)	5.367492 (0.0000)	3.106869 (0.0009)
Gourieroux, et al.	-	-	22.93791 (0.0000)

Mengingat hasil pengujian model sebelumnya belum memberikan kesimpulan yang definitif, dilakukan pengujian tambahan menggunakan metode Lagrange Multiplier (LM). Pengujian ini memberikan nilai probabilitas Breusch-Pagan sebesar 0,0417, yang melebihi batas signifikansi 0,05. Berdasarkan temuan tersebut mengarah pada penerimaan H_0 , sehingga model yang direkomendasikan ialah Common Effect Model (CEM).

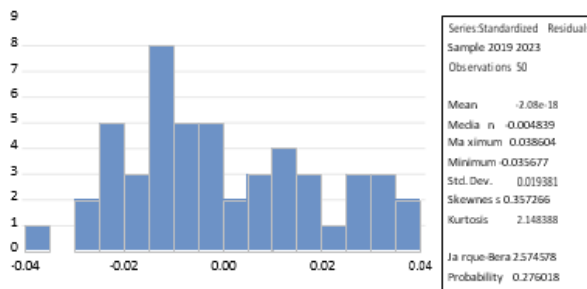
Merujuk dari hasil ketiga pengujian, model yang teridentifikasi paling representatif yaitu Fixed Effect Model (FEM). Atas dasar tersebut, model ini digunakan sebagai pendekatan estimasi regresi dalam penelitian.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas yang dimaksud dalam asumsi klasik dengan pendekatan OLS adalah data residual yang dibentuk model regresi linier berdistribusi normal, bukan variabel bebas maupun variabel terkainya, dalam penelitian ini untuk membuktikan apakah residual terdistribusi normal atau tidak dapat memperhatikan pengembalian keputusan.

Tabel 6
Uji Normalitas



Sumber: Output Eviews 12, 2025

Uji Multikolinieritas

Output analisis multikolinieritas memperlihatkan besaran korelasi antara variabel-variabel independen (Dana Transfer Khusus X1, Retribusi Daerah X2, Belanja Modal X3 dan Pajak Daerah X4) kurang dari $< 0,90$. Berdasarkan itu, dibuat kesimpulan bahwa model regresi terbebas oleh indikasi multikolinieritas pada setiap variabel.

Tabel 7
Uji Multikolinieritas

	X1	X2	X3	X4
X1	1.000000	0.431441	0.207414	0.380751
X2	0.431441	1.000000	0.427528	0.710870
X3	0.207414	0.427528	1.000000	0.562666
X4	0.380751	0.710870	0.562666	1.000000

Sumber: Output Eviews 12, 2025

Uji Heterokedastisitas

Identifikasi heteroskedastisitas pada riset ini dilaksanakan dengan memanfaatkan prosedur Harvey. Output analisis tersebut menghasilkan nilai probabilitas sebesar 0,6256 yang melebihi taraf signifikansi 0,05. Berdasarkan kriteria, dapat diinferensikan bahwa model bebas dari indikasi heteroskedastisitas.

Tabel 8
Uji Heteroskedastisitas

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.096615	0.330957	-0.291927	0.7720
X1	-0.000790	0.004195	-0.188380	0.8516
X2	-0.007128	0.013400	-0.531935	0.5980
X3	0.003105	0.008872	0.350030	0.7284
X4	0.012772	0.025948	0.492223	0.6256

Sumber: Output Eviews 12, 2025

Uji Autokorelasi

Pendeteksian autokorelasi pada penelitian ini dilaksanakan melalui prosedur *Durbin–Watson*. Nilai uji sebesar 2,276342 dibandingkan dengan nilai tabel pada $\alpha = 0,05$, $n = 45$, dan $k = 4$. Karena termasuk pada interval $dU < dW < 4 - dU$ ($1,7214 < 1,7214 < 2,2786$), maka model dikategorikan tidak mengandung autokorelasi.

Tabel 10
Hasil Uji Autokorelasi

N	K	du	4-du	DW	Kesimpulan
50	4	1.7214	2.2786	2.276342	Tidak ada Autokorelasi

Sumber: *Output Eviews 12, 2025*

Analisis Regresi Linier Berganda

$$Y = -9,512 + 0,000 X1 - 0,000 X2 + 0,027 X3 + 0,778 + e$$

1. Nilai konstansa (α) bernilai negative sebesar -9.512041 artinya variabel Dana Transfer Khusus, Retribusi Daerah, Belanja Modal dan Pajak Daerah, maka Kemandirian Keuangan Daerah nilainya mengalami Peningkatan senilai 9.512041 atau sebesar 9.512% dan variabel Y akan dipengaruhi oleh variabel lain.
2. Nilai koefisien regresi variabel dana transfer khusus bernilai sebesar 0.000504 artinya menyatakan bahwa per peningkatan sebesar 5% dengan asumsi variabel yang lainnya dianggap konstan.
3. Nilai koefisien regresi variabel Retribusi Daerah bernilai negative sebesar -0.000370. artinya menyatakan bahwa per peningkatan sebesar 3% dengan asumsi variabel yang lainnya dianggap konstan.
4. Nilai koefisien regresi variabel Belanja Modal bernilai sebesar 0.027681. artinya menyatakan bahwa per peningkatan sebesar 27,6% dengan asumsi variabel yang lainnya dianggap konstan.
5. Nilai koefisien regresi variabel Pajak Daerah bernilai sebesar 0.778660. artinya menyatakan bahwa per peningkatan sebesar 77,8% dengan asumsi variabel yang lainnya dianggap konstan.

Uji Hipotesis

Tabel 11
Hasil Uji Regresi *Fixed Effect Model*

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-9.512041	0.713268	-13.33587	0.0000
X1	0.000504	0.009041	0.055759	0.9558
X2	-0.000370	0.028880	-0.012822	0.9898
X3	0.027681	0.019120	1.447774	0.1563
X4	0.778660	0.055922	13.92396	0.0000

Effects Specification			
Cross-section fixed (dummy variables)			
Root MSE	0.019186	R-squared	0.961936
Mean dependent var	0.390270	Adjusted R-squared	0.948191
S.D. dependent var	0.099338	S.E. of regression	0.022611
Akaike info criterion	-4.509256	Sum squared resid	0.018405
Schwarz criterion	-3.973890	Log likelihood	126.7314
Hannan-Quinn criter.	-4.305386	F-statistic	69.98268
Durbin-Watson stat	2.276342	Prob(F-statistic)	0.000000

Sumber: Output Eviews 12, 2025

Uji Koefisien determinasi

Merujuk dari Tabel 11, nilai adjusted R² bernilai 0,948191 menunjukkan bahwa 94,8% variasi Dana Transfer Khusus, Retribusi Daerah, Belanja Modal dan Pajak Daerah sementara 5,2% lainnya dipengaruhi oleh faktor eksternal yang tidak terinklusi dalam kerangka model penelitian.

Uji F (Simultan)

Merujuk tabel 11, teridentifikasi nilai F-hitung mencapai 69,98268 dengan probabilitas 0,000000 melebihi nilai F- tabel sebesar 2,57 pada tingkat signifikans 0.05 (df1 = 4; df2 = 41). Karena erada di bawah 0,05, menunjukkan penolakan terhadap Ho serta penerimaan H5. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen secara bersamaan memberikan dampak esensial terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

Uji T (Parsial)

Merujuk pada hasil analisis yang terpapar dalam Tabel 11, kesimpulan berikut ini dapat dirumuskan:

1. Dana Transfer Khusus (X1) memiliki nilai t-hitung 0,055759 dengan probabilitas 0,9558 > 0,05. Temuan ini mengindikasikan bahwa secara terpisah, variabel X1 tidak memperlihatkan pengaruh secara signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi di Pulau Sumatera.
2. Retribusi Daerah (X2) memiliki nilai t-hitung -0,012822 dengan probabilitas 0,9898 > 0,05. Dengan demikian, variabel X2 yaitu Restribusi daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah provinsi di pulau sumatera.
3. Belanja Modal (X3) memiliki nilai t- hitung 1,447774 dengan probabilitas 0,1563 > 0,05. Dengan demikian, variabel X3 yaitu Belanja Modal tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kemandirian

Flypaper Effect pada Dana Transfer Khusus, Retribusi Daerah, Belanja Modal dan Pajak Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Provinsi di Pulau Sumatera

(Anggraini, et al.)

keuangan daerah provinsi di pulau sumatera.

4. Pajak Daerah (X4) memiliki nilai t- hitung 13,92396 dengan probabilitas $0,0000 > 0,05$. Dengan demikian, variabel X4 yaitu Pajak Daerah berpengaruh secara signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah provinsi di pulau sumatera.

Pembahasan

Pengaruh Dana Transfer Khusus terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Hipotesis pertama dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Dana Transfer Khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Hasil ini ditunjukkan dengan hasil pengujian secara persial dengan menggunakan uji-t, variabel Dana Transfer Khusus memiliki nilai t-hitung $< t$ -tabel ($0,055759 < 2,0141034$) artinya pengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah provinsi di pulau sumatera dan H1 dalam penelitian ini yaitu H0 diterima dan Ha ditolak. Hal ini menunjukkan bahawa meskipun dana transfer khusus terbukti tidak memiliki pengaruh pada yang signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah provinsi di pulau sumatera. Dalam konteks ini, dana transfer khusus penting untuk kemandirian keuangan daerah, karena mendukung pembangunan daerah dalam meningkatkan fasilitas daerah tersebut, baik fasilitas pelayanan public, fasilitas pembangunan sekolah, fasilitas rumah sakit dan pelayanan public lainnya yang menjadi pendukung dalam meningkatkan kemandirian keuangan daerah. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya dilakukan oleh (Awaludin & Wibowo, 2023) dengan variabel pendapatan asli daerah, dana alokasi khusus fisik dan dana desa terhadap kemiskinan daerah tertinggal, dengan menunjukkan bahwa dana alokasi khusus fisik tidak berdampak terhadap kemiskinan artinya masyarakat belum terbantu dengan fasilitas layanan public yang disediakan oleh pemerintah daerah dan belum memiliki kontribusi penuh terhadap masyarakat hal ini menyebabkan daerah tersebut mengalami daerah yang tertinggal. Penelitian lain yang dilakukan oleh (Awaludin & Wibowo, 2023) dan (Apriliani & Sudjana, 2023) penelitian ini mengadopsi teknik analisis yang lebih kompleks dan akurat, sehingga mampu menggambarkan buhungan antara dana transfer khusus terhadap kemandirian keuangan daerah yang lebih meyakinkan. Apabila dana transfer khusus direncanakan, dikelola dan dialokasikan dengan baik berdasarkan prinsip efisiensi dan efektifitas makan pembangunan suatu daerah dalam meningkatkan kemandirian keuangan daerah dapat memberikan dampak positif dalam berbagai aspek penyelenggaraan Pemerintah, dapat meningkatkan pelayanan public seperti pendidikan, kesehatan, insfrastruktur dan pelayanan administrasi yang pada akhirnya kebutuhan dan harapan masyarakat secara lebih optimal. Selain itu penggunaan dana transfer khusus secara transparan dan akuntabel juga akan dapat membangun dan memperkuat kepercayaan public terhadap insturnsi Pemerintah.

Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah disebabkan oleh Pemerintah daerah yang belum tegas terhadap pungutan Retribusi pada setiap daerahnya, Pemerintah seharusnya bersikap tegas terhadap Retribusi yang ada artinya semakin besar Retribusi daerah, semakin meningkat juga kemandirian keuangan daerah, Retribusi daerah menjadi salah satu factor penting dalam meningkatkan kemandirian keuangan daerah. Penelitian lain yanag dilakukan oleh (Saraswati & Nurharjanti, 2021) yaitu menunjukkan bahwa Retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah, Retribusi daerah tidak selalu diiringi peningkatan kemandirian keuangan daerah,

sehingga Retribusi daerah tidak mempengaruhi terhadap kemandirian keuangan daerah artinya sebesar ataupun sekecil apapun Retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah, penelitian lain yang sejalan ialah penelitian yang dilakukan oleh (Rahmayani, 2022) yang dimana hasil dari penelitian Retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah, Retribusi daerah merupakan pendapatan asli daerah yang digali atau yang diperoleh dari masing-masing daerah, yang memberikan kontribusi paling kecil terhadap PAD, sehingga tidak memperlihatkan kemampuan keuangan sebenarnya dari daerah. Akan tetapi hasil pungutan Retribusi dipergunakan untuk membiayai pengeluaran umu, namun bisa dinikmati secara langsung oleh masyarakat yang telah membayar Retribusi dan menggunakan fasilitas dari Pemerintah. Penelitian lain yang dilakukan oleh (Ariyo Dewantoro, 2022)

Yang dimanan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Retribusi daerah berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah yang artinya retribusi daerah merupakan factor pendorong kemandirian keuangan daerah, besar kecilnya Retribusi yang diperoleh daerah bergantung pada pemerintah daerah terutama dalam hal penyediaan fasilitas public yang bermanfaat sehingga perolehan Retribusi menjadi optimal, Retribusi daerah juga menjadi salah satu sumber pendanaan PAD suatu daerah, meskipun tidak sedominan pajak daerah. Penelitian yang dilakukan oleh (Sundjoto et al., 2023) yang dimana retribusi daerah berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah penelitian ini menunjukkan bahwa Retribusi daerah dapat membantu keuangan suatu daerah, Retribusi daerah membuktikan pula seberapa besar kemampuan suatu daerah dalam membiayai pembangunan dan operasional pemerintahannya tanpa bergantung pada dana transfer pusat.

Pengaruh Belanja Modal terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Belanja Modal tidak berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah artinya semakin besar belanja modal di daerah provinsi di pulau sumatera menunjukkan bahwa belanja modal yang dilakukan Pemerintah daerah provinsi di pulau sumatera belum sepenuhnya memberikan kontribusi terhadap kemandirian keuangan daerah. Belanja modal yang menjadi factor pendukung dalam mewujudkan tingkat kemandirian keuangan daerah, belanja modal ini dapat dilihat dari fasilitas layanan public yang ada seperti jalan, jembatan, sebagai pendukung kemajuan ekonomi daerah, masyarakat yang memerlukan fasilitas public yang dapat mendukung masyarakatnya dalam perekonomian. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh

(Nindita, 2019) hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah hal ini dapat diartikan bahwa belanja modal merupakan semua pengeluaran negara yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal meruokan semua pengeluaran negara yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal dalam bentuk tanah, peralatan mesin, gedung, bangunan, jaringan serta dalam bentuk fisik lainnya yang memiliki nilai manfaat lebih dari 12 bulan (1 periode) untuk menggunakan dalam kegiatan pemerintahan, artinya pemerintah ini menggambarkan bahwa belanja modal yang menjadi pengaruh pada kemandirian keuangan menjadi belanja modal yang digunakan masyarakat untuk kegiatan pemerintahannya, selain itu belanja modal sangat membantu masyarakat dalam kegiatan ekonominya untuk mendukung dan meningkatkan kemandirian keuangan daerah.

Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Pajak daerah berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah artinya semakin besar

Flypaper Effect pada Dana Transfer Khusus, Retribusi Daerah, Belanja Modal dan Pajak Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Provinsi di Pulau Sumatera
(Angraini, et al.)

pajak daerah yang ada di daerah provinsi di pulau sumatera sudah baik dan memberikan kontribusi terhadap kemandirian keuangan daerah penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Saraswati & Nurharjanti, 2021) yang dimana pajak daerah berpengaruh pada kemandirian keuangan daerah, pajak daerah pula menjadi factor pendukung yang penting bagi kemandirian keuangan daerah, pajak daerah juga menjadi fator pendukung yang penting bagi kemandirian keuangan daerah yang ada, pajak daerah sangat meningkat jika kesadaran masyarakat dalam kewajiban pajak yang dibayarkan oleh karena itu pajak daerah menjadi dana bantuan tambahan bagi pemerintah daerah dalam kegiatan pemerintahannya, pajak daerah juga menjadi factor yang penting dalam perekonomian keuangan khususnya pada keuangan public, dan penelitian yang menjelaskan tentang pajak daerah berpengaruh ialah penelitian yang dilakukan oleh (Sundjoto et al., 2023) Pemerintah daerah berupaya dalam mensejahterakan masyarakat melalui pungutan wajib pajak kepada perorangan atau badan bersifat memaksa untuk penyelenggaraan jalannya Pemerintah daerah dan meningkatkan tarif hidup masyarakat setempat dan dapat dilihat dari peran Pemerintah dan dukungan dari masyarakat yang akan membawa keberhasilan dalam penyelenggaraan Pemerintah daerah. Penelitian lain yang dilakukan oleh (Marselina & Herianti, 2022) (Rahmayani, 2022) yang menjelaskan bahwa pajak daerah tidak berpengaruh dikarenakan daerah tersebut masih bergantung pada dana transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat dan tidak mengembangkan sumber daya dengan pungutan pajak daerahnya oleh karena itu daerah tersebut masih bergantung pada dana transfer yang diberikan pada daerah tersebut, tentunya ini menjadi hal yang serius bagi pemerintah daerah dalam pungutan pajak yang ada. Dampak penelitian ini menjelaskan bahwa pajak daerah berpengaruh pada kemandirian keuangan daerah yang dimana pajak daerah mampu memungut kewajiban oajak daerah tersebut, dan dapat meningkatkan pembangunan fasilitas public yang dibutuhkan oleh masyarakat dan dapat menjadi factor pendukung dalam meningkatkan kemandirian keuangan yang ada.

Pengaruh Dana Transfer Khusus, Retribusi Daerah, Belanja Modal dan Pajak Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Persamaan penelitian ini yang dilakukan memiliki kesamaan dengan sejumlah studi sebelumnya yang juga menunjukkan bahwa variabel seperti dana transfer khusus, Retribusi daerah, Belanja modal dan Pajak daerah berpengaruh secara simultan terhadap kemandirian keuangand daerah, temuan ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menjelaskan bahwa Retribusi daerah, belanja modal dan pajak daerah memiliki pengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah dalam mengoptimalkan dana PADA merupakan elemen penting dalam peningkatan kemandirian keuangan daerah. Penelitian ini membuktikan bahwa variabel dana transfer khusus, Retribusi daerah, belanja modal dan pajak daerah secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Temuan ini mengindikasikan bahwa keempat variabel tersebut saling berkaitan dan sama-sama memainkan peran penting dalam menentukan sejauh manna Pemerintah daerah mampu mengelola keuangan secara optimal. Dengan kata lain pengelolaan Retribusi daerah yang tepat dan efektif dapat membantu dalam meningkatkan kemandirian keuangan daerah, dikombinasikan dengan kemampuan Pemerintah daerah dalam mengendalikan tekanan fiskal serta meningkatkan efektifitas dalam memobilisasi potensi PAD akan berdampak positif terhadap pencapaian kinerja keuangan yang lebih baik, begitu pula terhadap Retribusi daerah dan pajak daerah Pemerintah daerah dapat mengelola dengan tepat sasaran dan dengan efektif yang akhirnya akan menjadi dasar dalam peningkatan kemandirian keuangan daerah, dengan meningkatkan fasilitas umum, jalan,

jembatan dan aset lainnya yang dapat meningkatkan presentase kemandirian suatu daerah.

KESIMPULAN

Mengacu pada Hasil pengolahan data beserta interpretasi yang dilakukan menghasilkan simpulan:

1. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat tidak berpengaruh yang signifikan secara persial antara Dana Transfer Khusus, terhadap kemandirian keuangan daerah provinsi di pulau sumatera.
2. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat tidak berpengaruh yang signifikan secara persial antara Retribusi Daerah, terhadap kemandirian keuangan daerah provinsi di pulau sumatera.
3. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat tidak berpengaruh yang signifikan secara persial antara Belanja Modal, terhadap kemandirian keuangan daerah provinsi di pulau sumatera.
4. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat berpengaruh yang signifikan secara persial antara Pajak Daerah, terhadap kemandirian keuangan daerah provinsi di pulau sumatera.
5. Hasil analisis menunjukkan bahwa Dana Transfer Khusus, Retribusi Daerah, Belanja Modal dan Pajak Daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah provinsi di pulau sumatera dan terjadi fenomena Flypaper Effect

DAFTAR PUSTAKA

- Ades Hidayah, Sopiyan AR, & Riana Mayasari. (2025). Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Dana Insentif Fiskal pada Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia. *Economic Reviews Journal*, 4(2), 843–859. <https://doi.org/10.56709/mrj.v4i2.530>
- Apriliani, D., & Sudjana. (2023). Analisis Flypaper Effect, Pendapatan Asli Daerah (PAD), DanaAlokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat 2017-2021. *Indonesian Accounting Research Journal*, 4(1), 39–50.
- Ariyo Dewantoro, D. (2022). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. *Journal of Innovation in Management, Accounting and Business*, 1(2), 38–47.
- Awaludin, M. G., & Wibowo, P. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus Fisik, Dan Dana Desa Terhadap Kemiskinan Dan PDRB Daerah Tertinggal. *Jurnalku*, 3(4), 445–469. <https://doi.org/10.54957/jurnalku.v3i4.645>
- Bakar, A., & Said, S. W. (2021). Analisis Tingkat Kemandirian, Efektivitas Dan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Mimika. *Jurnal Kritis*, 5, 1–20.
- Dewi, N. A. W. T., Dewi, L. G. K., & Wiguna, I. G. N. H. (2024). Analisis Flypaper Effect dan Implikasinya Terhadap Kemandirian Fiskal Daerah: Efek Moderasi Upaya Pajka. *Jurnal Riset Akuntansi*, 14(1), 1–19.
- Lukitawati, L. J., & Pringgabayu, D. (2024). *Pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap kemandirian keuangan daerah*. 1(2), 1–16.
- Malau, E. I., & Simarmata, E. P. S. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dan Belanja Modal Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis (EK&BI)*, 3(2), 332–337. <https://doi.org/10.37600/ekbi.v3i2.196>
- Marselina, A., & Herianti, E. (2022). Determinan Kemandirian Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi Dan Governance*, 2(2), 110. <https://doi.org/10.24853/jago.2.2.110-118>